

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia tidak terlepas dari norma dan aturan yang berlaku, sehingga warga negara selalu terikat dengan norma dan aturan tersebut. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak negatif berupa peluang untuk melakukan kejahatan siber, termasuk perjudian online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime dan diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Namun, dalam praktek peradilan, masih ada perkara perjudian online yang diputus menggunakan Pasal 303 KUHP, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis bagaimana penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktek peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex specialis harus diperhatikan dalam pembuatan tuntutan hukum. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum terkait perjudian online di Indonesia.

**Keywords:** Key words: Perjudian online; keyword Cyber crime, Asas

## ABSTRACT

Indonesia is a legal state as stated in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. Therefore, Indonesia cannot be separated from the applicable norms and rules, so that citizens are always bound by these norms and rules. The development of information technology has had a negative impact in the form of opportunities to commit cyber crimes, including online gambling. Online gambling is categorized as cyber crime and is regulated in Article 27 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Referring to the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, special rules override general rules. However, in judicial practice, there are still cases online gambling which is decided using Article 303 of the Criminal Code, as in the District Court decision Number: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr. This research uses a statutory and case approach to analyze how online gambling perpetrators are prosecuted in judicial practice. The research results show that the principle of lex specialis must be taken into account when making legal claims. This is important to ensure consistency and fairness in law enforcement regarding online gambling in Indonesia.

**Keywords:** Key words: Online gambling; keywords Cyber crime, Principles